

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance dan clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif. Penerapan sistem tersebut bertujuan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Oleh karena itu untuk menghindari hal-hal tersebut lembaga pemerintah harus membentuk struktur pengendalian intern terhadap pengeluaran kas yang efektif agar penggunaannya dapat terkontrol dengan baik. Menurut Andayani (2008: 46) pengendalian intern adalah sebagai rencana organisasi dan semua metode yang terkoordinasi dan pengukuran-pengukuran yang diterapkan di perusahaan. Metode tersebut dilakukan untuk mengamankan aktiva, memeriksa keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. *American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)* dalam Andayani (2008: 47) mengatakan bahwa pengendalian intern merupakan proses yang dipengaruhi oleh aktivitas dewan komisaris, manajemen atau pegawai

lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang wajar mengenai pencapaian tujuan yang meliputi: 1) keandalan laporan keuangan, 2) efektivitas dan efisiensi operasi, 3) ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Pengendalian intern terhadap pengeluaran kas yang diterapkan dan dilaksanakan pada lembaga pemerintah perlu dirancang dengan baik dan memerlukan perhatian yang cukup serius dari pemerintah daerah, karena pemerintah yang bersangkutan harus berperan aktif dalam hal melaksanakan pengendalian intern. Jika pengendalian intern dilaksanakan dengan terarah dan pelaksanaannya bertanggungjawab penuh maka akan memperkecil tindakan penyelewengan terhadap kas. Dari kas ini manfaat yang diperoleh pun akan semakin besar sehingga dapat mengurangi kolusi atau hal serupa yang sering terjadi pada lembaga pemerintah.

Menurut Simamora (2000: 12) dalam upaya melindungi kas dari pencurian dan penyalahgunaan, perusahaan patutlah mengawasi kas mulai saat penerimaannya hingga penyetorannya ke bank. Catatan dari semua penerimaan kas haruslah dibuat segera mungkin. Jika penerimaan-penerimaan kas dicatat dengan cara tepat waktu dan akurat, maka jumlah uang yang hilang dapat dideteksi dengan membandingkan saldo aktual dengan saldo buku.

Menurut Jusuf (1981: 43) cara-cara yang digunakan untuk melakukan pengendalian intern terhadap penerimaan kas dalam perusahaan seringkali berbeda-beda antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya.

Menurut Niswonger, dkk (1999: 290) untuk melindungi kas dari pencurian dan penyalahgunaan, perusahaan harus mengendalikan kas mulai dari terimanya hingga disetorkan ke bank. Prosedur semacam ini disebut pengendalian preventif. Prosedur yang dirancang untuk mendeteksi pencurian atau penyalahgunaan kas disebut pengendalian detektif. Dalam pengertian tertentu, pengendalian detektif juga bersifat preventif (menengah) karena para karyawan akan berupaya menghindarkan pencurian atau penyalahgunaan bila mereka mengetahui bahwa hal semacam itu kemungkinan besar akan terungkap. Penerimaan kas berasal dari sumber utama yaitu penerimaan kas dari penjualan tunai.

Menurut Mulyadi (2001: 518) transaksi pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan oleh bagian kas sejak awal sampai akhir, tanpa campur tangan dari fungsi yang lain. Unsur sistem pengendalian intern mengharuskan pelaksanaan setiap transaksi oleh lebih dari fungsi agar tercipta adanya *internal check*. Dalam transaksi kas, bagian kas adalah pemegang fungsi penerimaan kas, dan fungsi penyimpanan kas. Transaksi penerimaan kas dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi penerimaan kas, dan fungsi akuntansi. Transaksi pengeluaran kas

dilaksanakan oleh fungsi pembelian, penerimaan barang, fungsi akuntansi, dan fungsi pengeluaran kas. Dengan pelaksanaan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas oleh lebih dari satu fungsi ini, kas perusahaan terjamin keamaannya dan data akuntansi yang dicatat dalam catatan akuntansi dapat dijamin ketelitian dan keandalannya.

Komisi Pemilihan Umum merupakan instansi pemerintah yang dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas sebagai bentuk akuntabilitas finansial dari lembaga tersebut dalam pengelolaan keuangan negara. Laporan keuangan tersebut disusun oleh bagian keuangan dan diasistensi oleh tim dari BPK RI, selain untuk kepentingan pengolahan data akuntansi, sistem akuntansi diterapkan juga berfungsi untuk memudahkan jalannya sistem pengendalian intern kas.

Menurut Kieso (2008: 342) kas merupakan salah satu asset yang paling likuid dan kas dapat dengan mudah digunakan disuatu keperluan baik didalam bentuk uang tunai atau dalam bentuk lainnya, karena salah suatu kriteria yang sangat melekat pada kas adalah bahwa kas dapat digunakan dengan segera, artinya apabila diminta oleh pihak yang bersangkutan maka dapat segera dikeluarkan, tetapi kas merupakan aktiva lancar yang sangat mudah untuk disalah gunakan dan diselewengkan oleh pihak-pihak tertentu, sehingga dalam upaya menghindari hal tersebut dibutuhkan pengendalian terhadap kas yang sangat mendukung kelancaran aktifitas manajemen dalam hal pengelolaan kas.

Menurut IAI (2009: 22) Mendefinisikan kas sebagai kas terdiri saldo kas (*cash on hand*) dan rekening giro. Setara kas adalah investasi yang sifatnya luquid berjangka pendek dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi perubahan risiko nilai yang signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kas merupakan pos aktiva dalam neraca yang paling liquid, maksudnya dapat dengan mudah dipergunakan sebagai alat pertukaran dan menunjukkan daya beli secara umum, dimana dalam berbagai bentuk dinyatakan dengan nilai sekarang yang jelas dan pasti dapat ditetapkan.

Kantor komisi pemilihan umum Kab. Bone Bolango adalah salah satu dari banyak instansi pemerintahan yang ada di provinsi gorontalo yang mengelola keuangan negara yang membutuhkan pengendalian intern atas aktiva/kas yang ada di instansi untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Kendala yang mungkin terjadi dalam kantor komisi pemilihan umum dalam menjalankan kegiatannya salah satunya yaitu sulitnya melakukan pengawasan/pengendalian yang efektif karena instansi tersebut kegiatannya yang semakin kompleks maka dibutuhkan laporan keuangan yang akurat. Hal ini dapat berdampak tidak baik pada kualitas laporan keuangan pada instansi tersebut. Disisi lain pengendalian intern kas yang dilakukan oleh kantor komisi pemilihan umum masih belum efektif, karena belum ada pemisahan fungsi antara pengurus kas dan fungsi pencatatan kas. Dalam melakukan penerimaan kas harus dilakukan oleh fungsi penerimaan dan setiap kali terjadi penerimaan kas

harus segera dicatat, sebagian besar kecurangan atas penerimaan kas biasanya terjadi sebelum penerimaan kas itu dicatat. Jika pencatatan telah dilakukan, maka penyelewengan akan lebih mudah untuk diusut. Pengendalian yang harus dilakukan oleh kantor komisi pemilihan umum sebaiknya diadakan pemisahan antara fungsi penerimaan kas dengan fungsi pencatatan/pembukuan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pengendalian intern kas yang telah ditetapkan oleh komisi pemilihan umum bahwa antara bagian penerimaan kas dengan bagian pencatatan/pembukuan kas masuk harus dilakukan oleh fungsi yang berbeda, agar ada pemisahan yang jelas antar fungsi dalam penerimaan kas dan fungsi pencatatan kas. Komisi pemilihan umum masih terdapat kelemahan pengendalian intern kas dari sisi organisasi dengan kurangnya jumlah SDM (sumber daya manusia) pada bagian akuntansi dan kurangnya koordinasi antar bagian sehingga sangat berpengaruh terhadap tidak memadainya pengendalian intern kas pada penyusunan keuangan yang berkualitas.

Hal ini sejalan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum pada tahun 2011, BPK masih memberikan opini *disclaimer*/tidak menyatakan pendapat (TMP). Opini TMP diberikan karena terdapat tiga permasalahan utama berkaitan dengan Sistem Pengendalian Intern (SPI). Mengingat pengendalian intern sangat dibutuhkan dalam mengendalikan pengelolaan keuangan pada instansi tersebut. Dan salah satu operasinya

yaitu proses penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum tidak dilakukan secara tertib, penatausahaan dan pengamanan persediaan belum dilaksanakan secara maksimal, serta pengendalian dan penatausahaan aset tetap belum terkonsolidasi. Dalam pemeriksaan laporan keuangan ini Badan Pemeriksa Keuangan RI juga melaporkan ketidakpatuhan entitas terhadap peraturan perundangan. Beberapa permasalahan ketidakpatuhan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum antara lain adalah masih adanya aset Komisi Pemilihan Umum berupa kendaraan dinas yang dikuasai oleh pihak lain dan realisasi pembayaran komponen tunjangan berupa biaya telepon, air, listrik, perlengkapan standar, dan biaya pemeliharaan yang dilakukan secara tunai, tidak sesuai dengan SE Mendagri No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2010.(BPK RI, 2013)

. Semakin efektif penerapan pengendalian intern kas di instansi tersebut maka keandalan dan kualitas laporan keuangan yang di hasilkan menjadi lebih baik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim (2010) yang menyatakan bahwa pengendalian intern kas berpengaruh kualitas laporan keuangan, dan penelitian yang dilakukan oleh blongkod (2012) yang menyatakan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, dan penelitian yang dilakukan oleh mohamad (2012) menyatakan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Mengingat sangat pentingnya pengendalian intern terhadap pengelolaan kas, maka penulis sangat tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul “Pengaruh Pengendalian Intern kas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan” (Studi Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum).

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Belum adanya pemisahan fungsi yang jelas antara petugas penerimaan kas dan pencatatan kas.
2. Masih terdapat kelemahan pengendalian intern kas dari sisi organisasi dengan kurangnya jumlah SDM (sumber daya manusia) pada bagian akuntansi dan kurangnya koordinasi antar bagian sehingga sangat berpengaruh terhadap tidak memadainya pengendalian intern kas pada penyusunan keuangan yang berkualitas pada kantor komisi pemilihan umum.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pengendalian intern kas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kab. Bone Bolango?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah pengendalian intern kas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kab. Bone Bolango.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1.5.1 Manfaat Teoritis

- 1) Diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan dalam bidang akuntansi khususnya yang berkaitan dengan pengendalian intern kas terhadap kualitas laporan keuangan.
- 2) Dapat Menjadi bahan acuan/referensi bagi pihak lain yang mengadakan penelitian yang berkaitan dengan kajian ini.

1.5.2 Manfaat Praktis

- 1) diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi kantor komisi pemilihan umum dalam melahirkan kebijakan strategis khususnya dibidang pengendalian intern kas dan laporan keuangan.